

Press Release
20 Maret 2024

ITDP Indonesia Merilis Studi Rekomendasi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek

Dukungan untuk upaya Pemerintah Nasional dalam peningkatan mobilitas warga Jabodetabek

- Pemerintah menargetkan penggunaan transportasi publik 60% di Jabodetabek pada tahun 2029. Namun hingga saat ini, penggunaan transportasi publik di Jakarta saja baru mencapai 10%.
- Pembangunan transportasi publik yang hanya terpusat di Jakarta menyebabkan ketimpangan layanan dan jaringan transportasi publik Jabodetabek yang membuat warga enggan menggunakan transportasi publik.
- Administrasi transportasi publik di Jabodetabek terbagi berdasarkan wilayah layanan moda: kota/kabupaten, provinsi, dan antarprovinsi, menghasilkan beragam lembaga pemerintah dan tumpang tindih kebijakan yang mengatur layanan transportasi publik.
- Saat ini, tarif terintegrasi hanya berlaku untuk layanan transportasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan ongkos transportasi warga Jabodetabek yang menggunakan transportasi publik masih belum terjangkau.
- Upaya mengintegrasikan akses antarmoda patut diapresiasi dengan kemunculan stasiun-stasiun integrasi, namun masih belum mengutamakan prinsip-prinsip yang mengutamakan inklusivitas, kenyamanan dan keamanan pengguna.
- Mendukung upaya-upaya ini, ITDP Indonesia merilis Studi “Rekomendasi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek” yang mencakup rekomendasi integrasi kelembagaan, integrasi tarif dan integrasi akses (infrastruktur).

Kondisi Transportasi Jabodetabek Saat Ini

Warga Jabodetabek harus menempuh perjalanan setidaknya 10,5 km setiap harinya untuk beraktivitas di Jakarta. Sementara itu cakupan area layanan transportasi publik massal masih terpusat di Jakarta yang telah mencapai 78% wilayah, dibandingkan dengan Bodetabek yang masing-masing kotanya masih di rentang 8% hingga 29%. Otoritas yang tidak terpadu menjadi penyebab utama ketimpangan cakupan layanan, di mana peran regulator dan operator setidaknya dipegang oleh tiga belas badan pemerintahan yang berbeda yang memiliki kewenangan untuk mengatur transportasi publik di wilayah Jabodetabek. Selain itu, prioritas setiap daerah pun berbeda sehingga belum tentu dapat memberikan pelayanan transportasi publik yang andal. Hal ini berakibat pada ketersediaan dan tingkat layanan transportasi publik yang berbeda-beda antarwilayah di Jabodetabek.

Berdasarkan Jajak Pendapat Litbang Kompas tahun 2022, alasan warga Jabodetabek belum mau beralih ke transportasi publik selain tingkat keamanan dan kenyamanan yang belum

merata, juga tarif layanan dianggap masih mahal dan lamanya waktu tunggu. Hal ini senada dengan temuan studi ITDP Indonesia (2023) di mana halangan yang dirasakan komuter meliputi kenyamanan (berdesakan, panas), waktu tempuh lebih lama, dan keandalan (tidak tepat waktu, dll).

Untuk mengatasi hal ini, di Jakarta terdapat inisiasi yang tinggi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan badan usaha milik daerah (BUMD) di bawahnya untuk mengintegrasikan transportasi publik secara fisik, dimulai dari revitalisasi area-area stasiun. Di mana hal ini masih sulit ditemukan di kota-kota selain Jakarta di Wilayah Jabodetabek. Integrasi tarif juga telah berlaku untuk layanan transportasi publik di bawah pengelolaan badan usaha milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tarif maksimum Rp10.000, tetapi tidak untuk layanan di luar itu, misalnya Commuter Line yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Studi Rekomendasi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek

Untuk mendukung upaya dan percepatan integrasi transportasi publik di Jabodetabek, *Institute for Transportation and Development Policy* (ITDP) Indonesia didukung oleh *UK Partnering for Accelerated Climate Transitions* (UK PACT), merilis studi “Rekomendasi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek” pada Rabu, 20 Maret 2024 di CGV Poins Mall Lebak Bulus. Studi ini meliputi rekomendasi integrasi kelembagaan, integrasi fisik dan integrasi tarif. Rekomendasi tersebut di antaranya:

1. Integrasi Kelembagaan

- a. Lembaga regulator dan pelaksana (operator) yang terintegrasi
- b. Peran regulator dan pelaksana harus dibedakan karena sifatnya yang berbeda.
- c. Pelaksana harus gesit dan adaptif terhadap setiap kemajuan teknologi agar entitas bisnis tetap relevan bagi mereka
- d. Regulator harus berada di bawah pengawasan publik secara umum sehingga lembaga pemerintah yang dipimpin oleh pejabat publik menjadi badan pengatur yang paling tepat

2. Integrasi Fisik

ITDP mendefinisikan integrasi fisik transportasi publik yang baik apabila dapat membuat perjalanan menggunakan transportasi publik menjadi:

1. Lebih cepat dan lebih mudah, yaitu memberikan akses yang paling dekat dan singkat, serta memastikan aksesibilitas fasilitas transportasi publik bagi seluruh kelompok.
2. Lebih selamat dan aman, yaitu memastikan pengguna transportasi publik yang juga pejalan kaki dapat melakukan transit tanpa khawatir akan konflik dengan kendaraan bermotor dan tindakan kriminal.
3. Lebih nyaman, yaitu memberikan ruang yang cukup, menyediakan fasilitas transportasi publik yang tepat, dan melindungi dari cuaca.

3. Integrasi Tarif

Rekomendasi terhadap skema tarif terintegrasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi terhadap Struktur Tarif
 - a. Harmonisasi struktur tarif tunggal dan antar moda
 - b. Memperluas jangkauan penerapan tarif flat
 - c. Meningkatkan kapasitas dan keandalan stasiun antar moda
 - d. Pemantauan berkala terhadap biaya dan manfaat
2. Rekomendasi tentang Distribusi Pendapatan
 - a. Kesiapan alat pengukur jarak antara semua halte bus dan stasiun di Jakarta
3. Rekomendasi tentang Inklusivitas Tarif
 - a. Penerapan skema tarif terintegrasi yang menjamin inklusi untuk semua
 - b. Pengelolaan transportasi publik dan sistem tarif yang perlu mempertimbangkan peran gender dan implikasi terhadap pola perjalanan perempuan
 - c. Memenuhi daftar periksa GESI dalam pengembangan skema tarif terintegrasi

Rekomendasi ini dapat dibaca dan diunduh selengkapnya melalui tautan [ini](#).

Diskusi Publik untuk Percepatan Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek

Untuk mendukung rilis studi ini, ITDP Indonesia didukung UK PACT menyelenggarakan Urban Transport Discussion #31: “Integrasi Kelembagaan, Solusi Karut-Marut Transportasi Jabodetabek?” yang diselenggarakan pada Rabu, 20 Maret 2024 di CGV Poin Mall Lebak Bulus. Acara dibuka dengan informasi pemasangan instalasi panel hasil studi “Rekomendasi Integrasi Transportasi Jabodetabek” di dua stasiun integrasi Jabodetabek; Stasiun Cawang dan Stasiun Lebak Bulus.

Sesi diskusi dimoderasi oleh Adinda Ramadhani Kusumo, Jurnalis Kompas TV dengan narasumber yang hadir dalam diskusi ini meliputi:

1. Dewi Pancawati, Peneliti Litbang kompascom
2. Hananto Prakoso, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat BPTJ
3. Gatot Indra Koswara, Kepala Divisi Operasional dan Keselamatan Transjakarta
4. Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP

Sesi diskusi dapat disaksikan tayangan ulangnya di bit.ly/utd31.

Dokumentasi acara dapat diunduh [di sini](#)

Kutipan dari Para Pembicara Urban Transport Discussion #31

Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP mengatakan:

"Kita harus memahami bahwa perjalanan warga menggunakan transportasi publik harus lancar dan tanpa hambatan agar dapat mencapai target penggunaan transportasi publik sebesar 60% pada tahun 2029. Integrasi kelembagaan, fisik, dan tarif adalah kunci penting untuk memperlancar perjalanan warga Jabodetabek."

Hananto Prakoso, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat BPTJ mengatakan:

"Konsep integrasi kelembagaan sudah masuk ke RPJMN 2025-2029. Ke depan, kota-kota aglomerasi di Indonesia akan bergerak sangat cepat dan perlu ada koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. Bappenas sudah memasukkan 10/11 kota aglomerasi yang menjadi prioritas untuk pembentukan lembaga."

Gatot Indra Koswara, Kepala Divisi Operasional. dan Keselamatan Transjakarta mengatakan:

"Usulan dari Transjakarta adalah adanya regulator dari pihak kementerian, termasuk pengalihan tanggung jawab pemberian subsidi ke pemerintah pusat. Nantinya executing agency (misal seperti Transjakarta sebagai operator) akan memperoleh subsidi untuk pelayanan transportasi umum dengan harapan layanan transportasi umum di seluruh Jabodetabek menjadi seragam"

Dewi Pancawati, Peneliti Litbang kompascom mengatakan:

"Aspek push policy (kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi) menjadi sangat penting untuk peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kebijakan berbasis fiskal yang lebih tegas seperti pembatasan kendaraan dan tarif parkir bisa menjadi contoh untuk diterapkan. Perlu kebijakan-kebijakan yang lebih tegas lagi, yang berbasis ekonomi terkait pembatasan kendaraan, parkir, tarif tol. Lembaga integrasi juga perlu."

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi -

Fani Rachmita, Communications Manager ITDP Indonesia, 081286237694/ fani.rachmita@itdp.org
; www.itdp-indonesia.org | facebook.com/ITDP Indonesia |Twitter & Instagram: @itdpindonesia